

Yth.

1. Direksi Bank Umum Syariah; dan
2. Direksi Bank Umum Konvensional yang Memiliki Unit Usaha Syariah, di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 /SEOJK.03/2021
TENTANG
RENCANA BISNIS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841), yang selanjutnya disebut POJK RBB, Bank diwajibkan untuk menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun. Selain itu, dengan adanya perkembangan ketentuan perbankan terkini yang antara lain menyebabkan perubahan cakupan, format, dan tata cara pelaporan Rencana Bisnis yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2018 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Rencana Bisnis Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Untuk mencapai tujuan usaha yang berpedoman kepada visi dan misi yang telah ditetapkan, BUS dan UUS perlu menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko, asas perbankan yang sehat, serta prinsip syariah. Rencana Bisnis harus disusun secara matang, realistis, dan komprehensif sehingga mencerminkan kompleksitas bisnis BUS dan UUS serta adaptabilitas BUS dan UUS dengan

perkembangan terkini sehingga dapat menjadi arah kebijakan serta pengembangan usaha BUS dan UUS.

II. RENCANA BISNIS

Sesuai POJK RBB, Rencana Bisnis BUS dan UUS paling sedikit mencakup:

1. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini berisi penjelasan umum, baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai hasil yang telah dicapai pada tahun terakhir, antara lain aspek permodalan; rentabilitas; penilaian risiko khususnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas; dana pihak ketiga; dan rasio keuangan. Selain itu, ringkasan eksekutif juga memuat target usaha BUS dan UUS dalam jangka pendek (1 (satu) tahun) sampai dengan jangka menengah (3 (tiga) tahun).

2. Kebijakan dan Strategi Manajemen

Bagian ini berisi penjelasan mengenai kebijakan dan strategi manajemen untuk 1 (satu) tahun ke depan, yang paling sedikit memuat analisis posisi BUS dan UUS dalam menghadapi persaingan usaha, kebijakan manajemen (*policy statements*), kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan, strategi pengembangan bisnis, strategi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan kebijakan remunerasi (*remuneration policies*).

3. Penerapan Manajemen Risiko dan Kinerja BUS dan UUS Saat Ini

Bagian ini berisi penjelasan baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai kondisi BUS dan UUS pada saat penyusunan Rencana Bisnis dan berfokus pada hal-hal utama yang perlu mendapat perhatian atau permasalahan yang dihadapi serta hasil yang telah dicapai oleh BUS dan UUS.

4. Proyeksi Laporan Keuangan

Bagian ini memuat informasi mengenai proyeksi keuangan BUS dan UUS untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam menyusun proyeksi keuangan dimaksud.

5. Proyeksi Rasio-rasio dan Pos-pos Tertentu Lainnya

Bagian ini memuat proyeksi rasio keuangan dan rasio tertentu lainnya untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

6. Rencana Pendanaan

Bagian ini mencerminkan rencana penghimpunan dana untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana serta strategi BUS dan UUS untuk merealisasikan rencana pendanaan.

7. Rencana Penanaman Dana

Bagian ini mencerminkan rencana penanaman dana untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi BUS dan UUS untuk merealisasikan rencana penanaman dana.

8. Rencana Penyertaan Modal bagi BUS

Bagian ini mencerminkan rencana penyertaan modal untuk 3 (tiga) tahun ke depan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.

9. Rencana Permodalan

Bagian ini paling sedikit meliputi proyeksi pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) serta rencana perubahan modal untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

10. Rencana Pengembangan Organisasi dan SDM

Bagian ini menguraikan informasi mengenai struktur organisasi dan kondisi SDM terkini, rencana pengembangan organisasi dan SDM yang sedang berlangsung, maupun rencana pengembangan terkait SDM lainnya paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ke depan.

11. Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru

Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru merupakan uraian mengenai rencana penyelenggaraan produk bank yang memenuhi definisi produk baru sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum. Bagian ini memuat fokus pengembangan dan hasil analisis dalam penyelenggaraan produk baru BUS dan UUS untuk 1 (satu) tahun ke depan.

12. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor meliputi rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan untuk 1 (satu) tahun ke depan. Pengertian jaringan kantor serta cakupan jaringan kantor yang dilaporkan dalam rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah dan unit usaha syariah.

13. Informasi Lainnya

Informasi lainnya memuat rencana-rencana lain yang perlu diuraikan (jika ada) namun tidak termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan pada angka 1 sampai dengan angka 12, antara lain langkah-langkah penyelesaian pembiayaan yang bermasalah termasuk Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional BUS dan UUS, *linkage program*, pengembangan pelayanan BUS dan UUS, dan/atau informasi lain yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Cakupan Rencana Bisnis yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan bersifat minimum sehingga BUS dan UUS dapat memperluas cakupan tersebut sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagaimana pada bagian I.

Penyusunan Rencana Bisnis mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Sesuai POJK RBB, Laporan Realisasi Rencana Bisnis disampaikan BUS dan UUS secara triwulanan, yaitu untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. Laporan Realisasi Rencana Bisnis paling sedikit mencakup penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi

Rencana Bisnis, rasio keuangan dan pos-pos tertentu, serta informasi lainnya.

2. Sesuai POJK RBB, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang dilaporkan secara semesteran. Dalam kaitan dengan tugas Dewan Komisaris, BUS dan UUS harus memiliki mekanisme internal dalam rangka penyusunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.

Cakupan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang disusun oleh Dewan Komisaris paling sedikit meliputi penilaian mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis, faktor-faktor yang memengaruhi kinerja BUS dan UUS secara umum, serta upaya memperbaiki kinerja BUS dan UUS dalam hal dari hasil penilaian terjadi penurunan kinerja.

Penyusunan Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. PELAPORAN

1. Sesuai POJK RBB, BUS dan UUS menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Tata cara dan batas waktu penyampaian laporan secara daring dilakukan sesuai dengan tata cara dan batas waktu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. BUS dan UUS pertama kali menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini untuk posisi data laporan bulan Maret 2021.
2. BUS dan UUS pertama kali menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini untuk posisi data laporan bulan Juni 2021.
3. BUS dan UUS pertama kali menyampaikan Rencana Bisnis sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini untuk Rencana Bisnis tahun 2022.
4. Dalam hal BUS dan UUS melakukan penyesuaian dan/atau perubahan atas Rencana Bisnis tahun 2021, BUS dan UUS menggunakan format sebagaimana yang digunakan dalam menyusun Rencana Bisnis tahun 2021.
5. Penyesuaian dan/atau perubahan Rencana Bisnis tahun 2021 disampaikan secara luring.

VI. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2018 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 /SEOJK.03/2021

TENTANG

RENCANA BISNIS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA BISNIS, LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS,
DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS
BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH**

DAFTAR ISI

I.	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS	1
1.	Ringkasan Eksekutif	1
2.	Kebijakan dan Strategi Manajemen.....	4
3.	Penerapan Manajemen Risiko dan Kinerja BUS dan UUS Saat Ini.....	5
4.	Proyeksi Laporan Keuangan	7
a.	Format Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).....	9
b.	Format Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi	13
c.	Format Proyeksi Laba Rugi.....	16
d.	Format Perhitungan Distribusi Bagi Hasil	23
e.	Format Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	25
f.	Format Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	26
g.	Format Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan.....	27
5.	Proyeksi Rasio-rasio dan Pos-pos Tertentu Lainnya	28
a.	Format Laporan Proyeksi Rasio-rasio dan Pos-pos Tertentu Lainnya	29
b.	Penjelasan Rasio Keuangan Pokok dan Pos-pos Tertentu.....	31
6.	Rencana Pendanaan	35
a.	Format Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga	36
b.	Format Rencana Penerbitan Surat Berharga	38
c.	Format Laporan Rencana Pendanaan Lainnya.....	39
7.	Rencana Penanaman Dana.....	40
a.	Format Rencana Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait	42
b.	Format Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Inti..	43
c.	Format Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu.....	44
d.	Format Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	45
e.	Format Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan	47
f.	Format Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Provinsi.....	48
g.	Format Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad	49
h.	Format Rencana Pemberian Pembiayaan kepada UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi.....	50

i.	Format Rencana Pemberian Pembiayaan kepada UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan	53
j.	Format Rencana Pemberian Pembiayaan kepada UMKM Berdasarkan Provinsi	54
k.	Format Rencana Penanaman Dana Dalam Bentuk Surat Berharga.....	55
l.	Format Rencana Penanaman Dana Lainnya	57
8.	Rencana Penyertaan Modal bagi BUS	58
9.	Rencana Permodalan.....	60
a.	Proyeksi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bagi BUS	60
b.	Rencana Perubahan Modal.....	60
10.	Rencana Pengembangan Organisasi dan SDM	64
a.	Format Kondisi dan Rencana Kebutuhan SDM.....	65
b.	Format Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia.....	65
c.	Format Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Format Rencana Penggunaan Tenaga Alih Daya (<i>Outsourcing</i>)	65
11.	Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru	67
12.	Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor.....	69
13.	Informasi Lainnya	71
II.	PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS.....	72
1.	Format Informasi Realisasi Rencana Bisnis dan Tindak Lanjut	73
2.	Format Laporan Realisasi Rasio Keuangan dan Pos-pos Tertentu ...	74
3.	Format Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor	77
4.	Format Laporan Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing, Hasil Pelaksanaan Kewajiban Alih Pengetahuan, dan Tenaga Alih Daya (<i>Outsourcing</i>)	78
5.	Format Laporan Realisasi Pendidikan dan Pelatihan SDM	79
6.	Format Laporan Realisasi <i>Linkage Program</i>	79
III.	PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS.....	81

I. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS

Rencana Bisnis BUS dan UUS paling sedikit mencakup:

1. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini berisi penjelasan umum, baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai hasil yang telah dicapai pada tahun terakhir, antara lain aspek permodalan; rentabilitas; penilaian risiko khususnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas; dana pihak ketiga; dan rasio keuangan. Selain itu ringkasan eksekutif juga memuat target usaha BUS dan UUS dalam jangka pendek (1 (satu) tahun) sampai dengan jangka menengah (3 (tiga) tahun).

Ringkasan eksekutif disusun sesuai dengan format yang ditetapkan dan paling sedikit mencakup:

a. Visi dan Misi BUS dan UUS

Bagian ini menguraikan visi dan misi yang menjadi tujuan BUS dan UUS yang selaras dengan rencana strategis jangka panjang BUS dan UUS.

b. Arah Kebijakan BUS dan UUS

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai arah dan kebijakan pengembangan usaha yang akan dilakukan BUS dan UUS baik jangka pendek maupun jangka menengah, yang diselaraskan dengan rencana strategis jangka panjang BUS dan UUS.

c. Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh BUS dan UUS

Bagian ini memberikan uraian mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh BUS dan UUS untuk mencapai visi dan misi BUS dan UUS sesuai dengan arah kebijakan BUS dan UUS ke depan.

d. Indikator Keuangan Utama

Bagian ini antara lain memuat posisi aktual (per posisi bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) maupun proyeksi. Contoh tabel indikator keuangan utama Rencana Bisnis sebagai berikut.

Indikator	Aktual Sep T-1							
		Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
			Mar	Jun	Sep	Des		
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)*								
Rasio Modal Inti terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)*								
Rasio Modal Inti Utama terhadap ATMR*								
Rasio Modal Inti terhadap Total Aset*								
<i>Return on Asset (ROA)</i>								
<i>Return on Equity (ROE)*</i>								
<i>Net Imbalan (NI)</i>								
<i>Net Operating Margin (NOM)</i>								
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)								

Indikator	Aktual Sep T-1							
		Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
			Mar	Jun	Sep	Des		
Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif								
Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif								
Rasio <i>Non Performing Financing</i> (NPF) <i>Gross</i>								
Rasio NPF <i>Net</i>								
Rasio Pembiayaan terhadap Total Aset Produktif								
Rasio Debitur Inti terhadap Total Pembiayaan								
Rasio Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Total Pembiayaan								
<i>Short Term Mismatch</i> (STM)								
Rasio Deposan Inti (RDI)								
Rasio Total Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek								
<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)								

Keterangan:

*) hanya berlaku bagi BUS

T merupakan tahun pelaksanaan Rencana Bisnis. Sebagai contoh, untuk Rencana Bisnis yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, BUS dan UUS menyampaikan data aktual posisi bulan September 2021 (T-1), data proyeksi posisi bulan Desember 2021 (T-1), data proyeksi tahun 2022 (T) secara triwulanan yaitu untuk posisi bulan Maret 2022, bulan Juni 2022, bulan September 2022, bulan Desember 2022, serta data proyeksi tahun 2023 (T+1) dan 2024 (T+2) secara

tahunan yaitu untuk posisi bulan Desember 2023 dan bulan Desember 2024.

e. Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Bagian ini menguraikan target atau fokus kegiatan usaha BUS dan UUS baik kuantitatif maupun kualitatif dalam jangka pendek maupun jangka menengah, sesuai dengan visi dan misi BUS dan UUS disertai dengan alasan pemilihan target, asumsi yang digunakan, dan strategi untuk mencapai target.

Target jangka pendek, misalnya berupa target penurunan tingkat NPF, peningkatan fungsi intermediasi, dan peningkatan efisiensi. Sementara itu target jangka menengah, misalnya target pengembangan kegiatan usaha berbasis syariah dan target penerapan tata kelola.

2. Kebijakan dan Strategi Manajemen

Bagian ini berisi penjelasan mengenai kebijakan dan strategi manajemen untuk 1 (satu) tahun ke depan, yang paling sedikit memuat:

- a. analisis posisi BUS dan UUS dalam menghadapi persaingan usaha, meliputi informasi mengenai posisi BUS dan UUS baik dalam kelompok usaha yang sama maupun secara industri, termasuk informasi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami BUS dan UUS. Dalam melakukan analisis posisi, BUS dan UUS menggunakan pendekatan tertentu, paling sedikit berupa analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman;
- b. kebijakan manajemen (*policy statements*), meliputi informasi umum kebijakan BUS dan UUS yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha BUS dan UUS pada waktu yang akan datang, antara lain rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan integrasi BUS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan konversi bank umum serta rencana pemisahan unit usaha syariah sesuai

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai persyaratan dan tata cara pemisahan unit usaha syariah;

- c. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan, meliputi informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas profil risiko BUS dan UUS dan upaya-upaya perbaikan yang akan ditempuh serta penjelasan mengenai kebijakan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan;
- d. strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha BUS dan UUS yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal; dan
- e. strategi pengembangan SDM dan kebijakan remunerasi (*remuneration policies*), paling sedikit meliputi informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur mengenai pemberian gaji, bonus, dan fasilitas lain yang bersifat keuangan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), termasuk kepada pegawai BUS dan UUS.

3. Penerapan Manajemen Risiko dan Kinerja BUS dan UUS Saat Ini

Bagian ini berisi penjelasan baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai kondisi BUS dan UUS pada saat penyusunan Rencana Bisnis dan menyoroti hal-hal utama yang perlu mendapat perhatian atau permasalahan yang dihadapi serta hasil yang telah dicapai BUS dan UUS.

Bagian ini paling sedikit memuat uraian mengenai:

- a. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk profil risiko untuk seluruh risiko

Uraian mengenai penerapan manajemen risiko meliputi evaluasi dan hasil penerapan manajemen risiko untuk periode awal tahun sampai dengan posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis.

Uraian mengenai penilaian profil risiko meliputi informasi

penilaian BUS dan UUS mengenai tingkat dan tren untuk seluruh risiko.

Tata cara penyusunan profil risiko dan evaluasi penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Dalam uraian ini termasuk pula evaluasi mengenai efektivitas dan hasil penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), serta rencana kerja kepatuhan untuk 1 (satu) tahun ke depan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

b. Penerapan Tata Kelola

Uraian mengenai penilaian penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

c. Kinerja Keuangan, khususnya Permodalan (*Capital*) dan Rentabilitas (*Earnings*)

Uraian mengenai kinerja keuangan BUS dan UUS termasuk hasil pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) dalam rangka memperbaiki kinerja BUS dan UUS (jika ada) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Uraian mengenai kinerja permodalan mencakup kecukupan dan komposisi, serta kemampuan permodalan BUS dan UUS dalam mengantisipasi risiko terhadap aset bermasalah; kemampuan BUS dan UUS untuk menambah modal dari laba operasional BUS dan UUS; kemampuan permodalan BUS dan UUS untuk mendukung pertumbuhan usaha; akses kepada sumber permodalan; dan kemampuan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan BUS dan UUS.

Uraian mengenai kinerja rentabilitas BUS dan UUS mencakup pencapaian *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE) bagi BUS, *Net Interest Margin* (NIM), perkembangan dan prospek laba operasional, rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan rasio beban operasional selain *margin/fee/ujrah* terhadap pendapatan kegiatan utama.

- d. Realisasi Pemberian Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Uraian mengenai realisasi pemberian pembiayaan mencerminkan peranan BUS dan UUS dalam mendukung perkembangan UMKM.

Pengelompokan UMKM mengacu pada kriteria usaha berdasarkan undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

- e. Penerapan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Uraian mengenai langkah yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa produk dan/atau aktivitas yang dilakukan oleh BUS dan UUS telah sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

4. Proyeksi Laporan Keuangan

Bagian ini memuat informasi mengenai kondisi keuangan BUS dan UUS posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bank) dan proyeksi untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan.

Proyeksi tahun pertama disusun secara triwulanan sedangkan proyeksi tahun kedua dan ketiga disusun secara tahunan (posisi akhir tahun).

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam menyusun proyeksi laporan keuangan dimaksud.

Asumsi makro antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, sedangkan asumsi mikro antara lain tingkat persaingan antarbank, pertumbuhan pembiayaan industri perbankan dan perbankan syariah, serta tingkat imbalan pembiayaan dan dana pihak ketiga yang digunakan dalam menyusun Rencana Bisnis.

Proyeksi laporan keuangan yang disusun meliputi:

- a. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
- b. Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi;
- c. Proyeksi Laba Rugi;
- d. Perhitungan Distribusi Bagi Hasil;
- e. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
- f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
- g. Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan.

Penyusunan proyeksi laporan keuangan mengacu pada format berikut.

a. Format Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
	ASET								
1	Kas								
2	Penempatan pada Bank Indonesia								
3	Penempatan pada Bank Lain								
4	Tagihan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>								
5	Surat Berharga yang Dimiliki								
6	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)								
7	Tagihan Akseptasi								
8	Piutang								
	a. Piutang Murabahah								
	b. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-								
	c. Piutang <i>Istishna'</i>								
	d. Pendapatan Margin <i>Istishna'</i> yang Ditangguhkan -/-								
	e. Piutang <i>Qardh</i>								
	f. Piutang Sewa								
	g. Piutang Multijasa								
	h. Pendapatan Margin Multijasa Yang Ditangguhkan -/-								
9	Pembiayaan Bagi Hasil								
	a. Mudarabah								
	b. Musyarakah								
	c. Lainnya								
10	Pembiayaan Sewa								
	a. Aset Ijarah								
	b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi -/-								
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-								

No.	POS - POS	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
11	Penyertaan Modal								
12	Aset Keuangan Lainnya								
13	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-								
	a. Surat Berharga yang dimiliki								
	b. Piutang/Pembiayaan yang diberikan								
	i. Piutang Murabahah								
	ii. Piutang <i>Istishna'</i>								
	iii. Piutang <i>Qardh</i>								
	iv. Piutang Sewa								
	v. Piutang Multijasa								
	vi. Pembiayaan Mudarabah								
	vii. Pembiayaan Musyarakah								
	viii. Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya								
	c. Aset Keuangan lainnya								
14	Aset Tidak Berwujud								
	Akumulasi Amortisasi -/-								
15	Aset Tetap dan Inventaris								
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/-								
16	Properti Terbengkalai								
17	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)								
18	Rekening Tunda								
19	Aset Antar Kantor								
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia								
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia								
20	<i>Salam</i>								
21	Aset <i>Istishna'</i> dalam Penyelesaian								
	Termin <i>Istishna'</i> -/-								
22	Persediaan								
23	Aset Lainnya								
	TOTAL ASET								

No.	POS	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
	LIABILITAS DAN EKUITAS								
1	Dana Simpanan Wadiah								
	a. Giro								
	b. Tabungan								
2	Dana Investasi <i>Non Profit Sharing</i>								
	a. Giro								
	b. Tabungan								
	c. Deposito								
3	Uang Elektronik								
4	Liabilitas kepada Bank Indonesia								
5	Liabilitas kepada Bank Lain								
6	Liabilitas <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>								
7	Liabilitas Akseptasi								
8	Surat Berharga yang Diterbitkan								
9	Pembiayaan Diterima								
10	Setoran Jaminan								
11	Liabilitas Antar Kantor								
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia								
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia								
12	Liabilitas Lainnya								
13	Dana Investasi <i>Profit Sharing</i>								
	a. Giro								
	b. Tabungan								
	c. Deposito								
	d. Liabilitas kepada Bank Lain								
	e. Surat Berharga								
	f. Pembiayaan Diterima								

No.	POS - POS	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
14	Modal Disetor								
	a. Modal Dasar								
	b. Modal yang Belum Disetor -/-								
	c. Saham yang Dibeli Kembali (<i>Treasury Stock</i>) -/-								
15	Tambahan Modal Disetor								
	a. Agio								
	b. Disagio -/-								
	c. Modal Sumbangan								
	d. Waran yang diterbitkan								
	e. Opsi saham								
	f. Dana Setoran Modal								
	g. Lainnya								
	i. Keuntungan								
	ii. Kerugian -/-								
	h. Penghasilan Komprehensif Lainnya								
	Keuntungan								
	Kerugian -/-								
16	Cadangan								
	a. Umum								
	b. Tujuan								
17	Laba/Rugi								
	a. Tahun-tahun Lalu								
	i. Laba								
	ii. Rugi -/-								
	b. Tahun Berjalan								
	i. Laba								
	ii. Rugi -/-								
	c. Dividen yang dibayarkan -/-								
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS								

Keterangan:
Tata cara pengisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

	POS - POS	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
E	TAGIHAN KONTINJENSI								
1	Garansi yang Diterima								
2	Pendapatan dalam Penyelesaian								
	a. Terkait dengan Bank								
	1) Murabahah								
	2) Istishna'								
	3) Sewa								
	4) Bagi hasil								
	5) Multijasa								
	6) Lainnya								
	b. Tidak Terkait dengan Bank								
	1) Murabahah								
	2) Istishna'								
	3) Sewa								
	4) Bagi hasil								
	5) Multijasa								
	6) Lainnya								
3	Lainnya								
	a. Terkait dengan Bank								
	b. Tidak Terkait dengan Bank								
F	KEWAJIBAN KONTINJENSI								
1	Garansi yang Diberikan								
	a. Terkait dengan Bank								
	b. Tidak Terkait dengan Bank								
2	Lainnya								
	a. Terkait dengan Bank								
	b. Tidak Terkait dengan Bank								

	POS	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
G	LAINNYA								
1	Aset Produktif yang Dihapus Buku								
	a. Aset Produktif (aset keuangan)								
	1) Pembiayaan yang Diberikan								
	2) Lainnya								
	b. Aset Produktif (keuangan) Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih								
	1) Pembiayaan yang Diberikan								
	2) Lainnya								
2	Aset Produktif (keuangan) yang Dihapus Tagih								
	a. Terkait dengan Bank								
	b. Tidak Terkait dengan Bank								
3	Penerusan Dana (<i>channeling</i>)								
	TAGIHAN KOMITMEN								
1	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik								
	a. Rupiah								
	b. Valuta Asing								
	KEWAJIBAN KOMITMEN								
2	Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik								
	a. <i>Committed</i>								
	Rupiah								
	Valuta Asing								
	b. <i>Uncommitted</i>								
	Rupiah								
	Valuta Asing								
3	Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik								
	a. <i>Committed</i>								
	Rupiah								
	Valuta Asing								
	b. <i>Uncommitted</i>								
	Rupiah								
	Valuta Asing								
	TAGIHAN KONTINJENSI								
4	Garansi yang diterima								
	a. Rupiah								
	b. Valuta Asing								
5	KEWAJIBAN KONTINJENSI								
	Garansi yang diberikan								
	a. Rupiah								
	b. Valuta Asing								
	LAINNYA								
6	Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan								

No.	POS - POS	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
	b. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank								
	1) Pendapatan dari Piutang								
	a) Murabahah								
	b) <i>Istishna'</i>								
	c) <i>Ujrah</i>								
	d) Multijasa								
	e) Lainnya								
	2) Pendapatan Bagi Hasil								
	a) Mudarabah								
	b) Musyarakah								
	c) Lainnya								
	3) Pendapatan Sewa Ijarah								
	Penyusutan Aset Ijarah -/-								
	4) Pendapatan <i>Salam</i>								
	5. Pendapatan dari Transaksi Antar Kantor								
	a. Kantor Pusat/Cabang Sendiri di Luar Indonesia								
	b. Kantor Pusat/Cabang Sendiri di Indonesia								
	6. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa -/-								
II	Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi -/-								
	1. <i>Non Profit Sharing</i>								
	a. Kepada Bank Lain								
	1) Giro								
	2) Tabungan								
	3) Deposito								
	4) Surat Berharga yang Diterbitkan								
	5) Pembiayaan Diterima								
	6) Lainnya								
	b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank								
	1) Giro								
	2) Tabungan								
	3) Deposito								
	4) Surat Berharga yang Diterbitkan								
	5) Pembiayaan Diterima								
	6) Lainnya								
	c. Transaksi Antar Kantor								
	1) Kantor Pusat/Cabang Sendiri di Luar Indonesia								
	2) Kantor Pusat/Cabang Sendiri di Indonesia								

No.	POS - POS	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
	2. Profit Sharing								
	a. Kepada Bank Lain								
	1) Giro								
	2) Tabungan								
	3) Deposito								
	4) Surat Berharga yang Diterbitkan								
	5) Pembiayaan Diterima								
	6) Lainnya								
	b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank								
	1) Giro								
	2) Tabungan								
	3) Deposito								
	4) Surat Berharga yang Diterbitkan								
	5) Pembiayaan Diterima								
	6) Lainnya								
	c. Transaksi Antar Kantor								
	1) Kantor Pusat/Cabang Sendiri di Luar Indonesia								
	2) Kantor Pusat/Cabang Sendiri di Indonesia								
III	Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil (I-II)								
IV	Pendapatan Operasional Lainnya								
	1. Pendapatan dari Transaksi Surat Berharga								
	a. Peningkatan Nilai Wajar Surat Berharga yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi								
	b. Keuntungan Penjualan Surat Berharga								
	2. Keuntungan Transaksi <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>								
	a. Perubahan Nilai Wajar								
	b. Keuntungan Transaksi								
	3. Pendapatan Bank selaku Mudarib dalam <i>Mudharabah Muqayyadah</i>								
	4. Pendapatan dari Penyertaan, <i>Fee</i> /Komisi/Provisi								
	a. Dividen								
	b. Keuntungan dari Penyertaan dengan <i>Equity Method</i>								
	c. <i>Fee</i> /Komisi/Provisi								
	5. Koreksi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai								
	a. Aset Keuangan								
	b. Aset Lainnya								
	6. Keuntungan Pelepasan Aset Ijarah								
	7. Lainnya								

No.	POS - POS	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
V	Beban Operasional -/-								
	1. Beban Imbalan kepada Bank Indonesia								
	2. Bonus Titipan Wadiah								
	a. Bank Lain								
	b. Lainnya								
	3. Beban Transaksi Surat Berharga								
	a. Penurunan Nilai Wajar Surat Berharga yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi								
	b. Kerugian Penjualan								
	4. Kerugian Transaksi <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>								
	a. Perubahan Nilai Wajar								
	b. Kerugian Transaksi								
	5. Kerugian dari Penyertaan dan Beban Komisi/Provisi								
	6. Premi Asuransi								
	7. Cadangan Kerugian Penurunan Nilain (CKPN) Aset Keuangan								
	a. Penempatan pada Bank Lain								
	b. Tagihan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>								
	c. Surat Berharga								
	d. Tagihan Akseptasi								
	e. Piutang								
	1) Piutang Murabahah								
	2) Piutang <i>Istishna'</i>								
	3) Piutang Sewa								
	4) Piutang <i>Qardh</i>								
	5) Piutang Multijasa								
	f. Pembiayaan Bagi Hasil								
	1) Mudarabah								
	2) Musyarakah								
	3) Lainnya								
	g. Pembiayaan Sewa								
	h. Penyertaan								
	j. Lainnya								

No.	POS - POS	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
	8. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya								
	9. Penyusutan/Amortisasi								
	10. Penyisihan Kerugian Risiko Operasional								
	11. Kerugian Terkait Risiko Operasional (termasuk Kerugian karena Kehilangan Aset Tetap dan Inventaris)								
	12. Kerugian Restrukturisasi Pembiayaan								
	13. Biaya Perbaikan Aset Ijarah								
	14. Kerugian Pelepasan Aset Ijarah								
	15. Tenaga Kerja								
	a. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah								
	b. Direksi								
	c. Karyawan								
	d. Lainnya								
	16. Pendidikan dan Pelatihan								
	a. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah								
	b. Direksi								
	c. Karyawan								
	d. Lainnya								
	17. Penelitian dan Pengembangan								
	18. Sewa								
	19. Promosi								
	20. Pajak-pajak (Tidak termasuk Pajak Penghasilan)								
	21. Pemeliharaan dan Perbaikan								
	22. Barang dan Jasa								
	23. Lainnya								
VI	1. Laba Operasional								
	2. Rugi Operasional -/-								
VII	Pendapatan Nonoperasional								
	1. Keuntungan dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris								
	2. Keuntungan dari Penjabaran Transaksi Valuta Asing								
	3. Penerimaan Klaim Asuransi Kerugian Operasional								
	4. Lainnya								

No.	POS - POS	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
VIII	Beban Nonoperasional								
	1. Keuntungan dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris								
	2. Keuntungan dari Penjabaran Transaksi Valuta Asing								
	3. Lainnya								
IX	1. Laba Nonoperasional								
	2. Rugi Nonoperasional -/-								
X	1. Laba Tahun Berjalan								
	2. Rugi Tahun Berjalan -/-								
XI	1. Penerimaan Transfer Laba								
	2. Penerimaan Transfer Rugi								
XII	1. Transfer Laba ke Kantor Pusat								
	2. Transfer Rugi ke Kantor Pusat								
XIII	Pajak Penghasilan								
	1. Taksiran Pajak Tahun Berjalan								
	2. Pajak Tangguhan								
	a. Pendapatan								
	b. Beban -/-								
XIV	Laba/Rugi Bersih								
	1. Laba Bersih								
	2. Rugi Bersih -/-								
	PENDAPATAN DARI PENYALURAN DANA DALAM VALUTA ASING								
	1. Penempatan pada Bank Indonesia								
	2. Penempatan pada Bank Lain								
	3. Surat Berharga yang dimiliki								
	4. Pembiayaan/Piutang/Pembiayaan yang Diberikan								
	5. Lainnya								

No.	POS - POS	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
	DISTRIBUSI BAGI HASIL DALAM VALUTA ASING								
	1. Liabilitas pada Bank Indonesia								
	2. Liabilitas pada Bank Lain								
	3. Dana pihak ketiga bukan bank								
	4. Surat Berharga yang diterbitkan								
	5. Pembiayaan yang diterima								
	6. Lainnya								
	PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA DALAM RUPIAH								
	1. Komisi/provisi/fee dan administrasi								
	2. Penerimaan Pembiayaan yang dihapus buku								
	3. Keuntungan penjabaran transaksi valuta asing								
	BEBAN OPERASIONAL LAINNYA								
	1. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)								
	a. Penempatan pada Bank Lain								
	b. <i>Spot</i> dan Derivatif/ <i>Forward</i>								
	c. Surat berharga								
	d. Tagihan Akseptasi								
	e. Pembiayaan/Piutang/Pembiayaan								
	f. Penyertaan								
	g. Lainnya								
	h. Transaksi Rekening Administratif								
	2. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>								

Keterangan :
Tata cara pengisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

d. Format Perhitungan Distribusi Bagi Hasil

(dalam jutaan rupiah)

[illegible]

	POS-POS	Aktual Sept		Proyeksi													
		T-1		Des T-1		Mar T		Jun T		Okt T		Des T		Des T+1		Des T+2	
		Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾	Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾	Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾	Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾	Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾	Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾	Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾	Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾
	PROFIT SHARING																
	PENGHIMPUNAN DANA																
1	Giro Mudarabah																
2	Tabungan Mudarabah																
3	Deposito Mudarabah																
	1 Bulan																
	3 Bulan																
	6 Bulan																
	12 Bulan																
4	Liabilitas kepada Bank Lain																
5	Surat Berharga yang Diterbitkan																
6	Pembiayaan yang Diterima																
7	Lainnya																
	PENYALURAN DANA																
1	Penempatan pada Bank Lain																
2	Surat Berharga yang Dimiliki																
3	Piutang Murabahah																
4	Piutang <i>Istishna</i> '																
5	Piutang Multijasa																
6	Pembiayaan Gadai																
7	Pembiayaan Mudarabah																
8	Pembiayaan Musyarakah																
9	Pembiayaan Sewa																
10	Pembiayaan Lainnya																

Keterangan:

- ¹⁾ Jumlah adalah nilai rata-rata dari saldo rata-rata jumlah penyaluran atau penghimpunan dana setiap bulan sampai dengan bulan laporan.
- ²⁾ Imbalan dalam penyaluran dana adalah jumlah pendapatan margin/bagi hasil/*ujrah* yang diterima dari penyaluran pembiayaan untuk dibagihasilkan pada setiap bulan sampai dengan bulan laporan.

f. Format Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
1	Saldo Awal Dana Kebajikan								
2	Penerimaan Dana Kebajikan								
	a. Infak								
	b. Sedekah								
	c. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif								
	d. Denda								
	e. Penerimaan Nonhalal								
	f. Lainnya								
3	Penggunaan Dana Kebajikan								
	a. Dana Kebajikan Produktif								
	b. Sumbangan								
	c. Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum								
4	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan								
5	Saldo Akhir Dana Kebajikan								

g. Format Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan

No	Asumsi ¹⁾	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T ²⁾				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
Asumsi Makro									
1	Pertumbuhan PDB (%)								
2	Inflasi (%)								
3	Kurs IDR/USD								
4	BI 7 Days Rate								
5	Lainnya								
Asumsi Mikro									
1	Pertumbuhan Pembiayaan (%)								
2	Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (%)								
3	Tingkat Imbalan Simpanan-Tabungan (%)								
4	Tingkat Imbalan Pembiayaan (%)								
5	Lainnya								

Keterangan:

- ¹⁾ Asumsi lainnya seperti nilai tukar, pertumbuhan ekspor, pertumbuhan impor, dan pangsa BUS dan UUS terhadap industri dilampirkan pada bagian terpisah.
- ²⁾ Dalam hal tidak tersedia asumsi per triwulan, dapat menggunakan asumsi per tahun.

5. Proyeksi Rasio-rasio dan Pos-pos Tertentu Lainnya

Bagian ini memuat rasio keuangan dan rasio tertentu lainnya posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan proyeksi untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan, sebagai berikut:

a. Rasio Keuangan Pokok

Proyeksi rasio keuangan pokok meliputi rasio-rasio yang paling sedikit dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

b. Pos-Pos Tertentu Lainnya

Proyeksi pos-pos tertentu lainnya meliputi proyeksi beberapa rasio terkait pembiayaan kepada UMKM, rasio dana pendidikan, dan rasio aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional BUS dan UUS terhadap modal.

Selain itu dicantumkan pula pos-pos tertentu yang memberikan informasi mengenai penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Proyeksi ini disusun dengan mengacu pada format berikut.

No	Nama Komponen	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
B	POS-POS TERTENTU LAINNYA (%)								
1	Rasio Total Pembiayaan kepada Usaha Mikro terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM								
2	Rasio Total Pembiayaan kepada Usaha Kecil terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM								
3	Rasio Total Pembiayaan kepada Usaha Menengah terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM								
4	Rasio Total Pembiayaan kepada UMKM terhadap Total Pembiayaan								
5	a. Rasio Dana Pendidikan dan Pelatihan terhadap Pengeluaran Realisasi/Anggaran SDM ³⁾								
	b. Rasio Sisa Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Tahun Ini yang Digunakan untuk Tahun Berikutnya ⁴⁾								
6	Rasio Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Bank terhadap Modal								
7	Rasio Beban <i>Overhead</i> terhadap Total Asset ²⁾								
8	Rasio Beban <i>Overhead</i> terhadap Pendapatan Operasional ²⁾								

Keterangan:

- 1) Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan BUS dan UUS.
- 2) Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan sesuai dengan penjelasan rasio keuangan pokok dan pos-pos tertentu.
- 3) Cakupan dana pendidikan dan latihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan dana untuk pengembangan sumber daya manusia bank umum.
- 4) Sisa anggaran merupakan selisih antara dana yang wajib disediakan dengan realisasinya.
- 5) Hanya berlaku bagi BUS.

b. Penjelasan Rasio Keuangan Pokok dan Pos-pos Tertentu

No.	RASIO	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
RASIO KEUANGAN			
1	<i>Return On Asset</i> (ROA)	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$	1) Laba Sebelum Pajak adalah laba tahun berjalan yang disetahunkan. 2) Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) sebagaimana tercantum dalam Laporan Bank Umum Terintegrasi.
2	<i>Net Operating Margin</i> (NOM)	$\frac{\text{Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil} - \text{Beban Operasional}}{\text{Rata-rata Aset Produktif}}$	1) Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil adalah pendapatan penyaluran dana setelah dikurangi beban bagi hasil dan beban operasional (disetahunkan). 2) Pendapatan penyaluran dana meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran dana, sedangkan beban bagi hasil meliputi seluruh beban bagi hasil dari penghimpunan dana. 3) Beban Operasional adalah beban operasional termasuk beban bagi hasil dan bonus (disetahunkan). 4) Aset produktif yang diperhitungkan adalah aset yang menghasilkan bagi hasil, imbalan, dan bonus baik di Laporan Posisi Keuangan (Neraca) maupun di Transaksi Rekening Administratif (TRA). 5) Rata-rata Aset Produktif. Contoh: Untuk posisi Juni: penjumlahan total aset produktif posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan
3	<i>Net Imbalan</i> (NI)	$\frac{\text{Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil} - (\text{Imbalan dan Bonus})}{\text{Rata-rata Aset Produktif}}$	1) Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil - (Imbalan dan Bonus) adalah pendapatan penyaluran dana setelah dikurangi beban imbal hasil, imbalan, dan bonus (disetahunkan). 2) Pendapatan penyaluran dana meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran dana, sedangkan beban imbal hasil meliputi seluruh beban bagi hasil, imbalan, dan bonus dari penghimpunan dana. 3) Aset produktif yang diperhitungkan adalah aset yang menghasilkan bagi hasil, imbalan, dan bonus baik di Laporan Posisi Keuangan (Neraca) maupun pada TRA. 4) Rata-rata Aset Produktif. Contoh: Untuk posisi Juni: penjumlahan total aset produktif posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.
4	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$	1) Beban Operasional adalah beban operasional termasuk beban bagi hasil dan bonus (disetahunkan). 2) Total pendapatan operasional meliputi pendapatan margin, <i>ujrah</i> , dan bagi hasil serta pendapatan operasional lainnya
5	Rasio <i>Fee Based Income</i> terhadap Total Pendapatan Operasional	$\frac{\text{Fee Based Income}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$	1) <i>Fee based income</i> meliputi pendapatan komisi/provisi/ <i>fee</i> yang berasal dari kegiatan penyaluran dana, pembiayaan, dan lainnya. 2) Total pendapatan operasional meliputi pendapatan margin, <i>ujrah</i> , dan bagi hasil serta pendapatan operasional lainnya
6	Rasio Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan	$\frac{\text{Pembiayaan Bagi Hasil}}{\text{Total Pembiayaan}}$	1) Pembiayaan Bagi Hasil adalah seluruh pembiayaan dengan akad bagi hasil baik yang menggunakan metode <i>profit and loss sharing</i> maupun <i>revenue sharing</i> . 2) Total pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca), secara gross (sebelum dikurangi CKPN). 3) Total pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.

No.	RASIO	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
7	Rasio Aset Produktif Bermasalah dan Aset Nonproduktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Nonproduktif	$\frac{\text{Aset Produktif Bermasalah} + \text{Aset Nonproduktif Bermasalah}}{\text{Total Aset Produktif} + \text{Total Aset Nonproduktif}}$	1) Cakupan komponen dan kualitas aset produktif dan aset nonproduktif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS. 2) Aset Produktif Bermasalah dan Aset Nonproduktif Bermasalah adalah aset dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. 3) Aset Produktif Bermasalah dan Aset Nonproduktif Bermasalah dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan TRA, secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN). 4) Total Aset Produktif dan Total Aset Nonproduktif dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan TRA, secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).
8	Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif	$\frac{\text{Aset Produktif Bermasalah (diluar TRA)}}{\text{Total Aset Produktif (diluar TRA)}}$	1) Cakupan komponen dan kualitas aset produktif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS. 2) Aset Produktif Bermasalah adalah aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Aset Produktif Bermasalah dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan 3) Total Aset Produktif dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca), secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).
9	Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif	$\frac{\text{CKPN Aset Keuangan}}{\text{Total Aset Produktif (diluar TRA)}}$	1) CKPN adalah cadangan yang wajib dibentuk BUS dan UUS mengacu pada ketentuan dan standar akuntansi, yang mencakup CKPN individual dan CKPN kolektif. 2) Perhitungan CKPN mengacu pada ketentuan dan standar akuntansi. 3) Cakupan komponen aset produktif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS. Total aset produktif dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca sebelum dikurangi CKPN.
10	Rasio CKPN yang Telah Dibentuk terhadap Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) Wajib Dibentuk	$\frac{\text{CKPN atas Aset Produktif Neraca} + \text{PPKA atas Aset Produktif TRA}}{\text{PPKA Wajib Dibentuk atas Aset Produktif Neraca dan TRA}}$	1) CKPN adalah cadangan yang wajib dibentuk BUS dan UUS mengacu pada ketentuan dan standar akuntansi, yang mencakup CKPN individual dan CKPN kolektif. 2) Perhitungan CKPN mengacu pada ketentuan dan standar akuntansi. 3) Perhitungan PPKA wajib dibentuk atas aset produktif Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan TRA sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS.
11	Rasio <i>Non Performing Financing</i> (NPF) <i>Gross</i>	$\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$	1) Pembiayaan adalah pembiayaan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS. 2) Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank. 3) Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. 4) Pembiayaan bermasalah dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca), secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN). 5) Total Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca), secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).
12	Rasio NPF <i>Net</i>	$\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah} - \text{CKPN Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$	1) Pembiayaan adalah pembiayaan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS. 2) Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank. 3) Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. 4) Pembiayaan Bermasalah dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca). 5) CKPN Pembiayaan Bermasalah adalah cadangan yang wajib dibentuk Bank untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), yang mencakup CKPN pembiayaan secara individual dan kolektif. 6) Total Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca), secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).
13	Rasio Pembiayaan terhadap Total Aset Produktif	$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Aset Produktif}}$	1) Total Pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank. 2) Total Aset Produktif adalah pembiayaan, surat berharga, penyertaan, dan tagihan lainnya yang tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca), baik kepada pihak ketiga bukan bank maupun kepada bank, termasuk kepada Bank Indonesia.

No.	RASIO	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
14	Rasio Debitur Inti terhadap Total Pembiayaan	$\frac{\text{Pembiayaan kepada Debitur Inti}}{\text{Total Pembiayaan}}$	1) Pembiayaan kepada Debitur Inti meliputi pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank baik debitur individual maupun grup diluar pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut: - bagi BUS dan UUS yang memiliki total aset kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) meliputi pembiayaan kepada 10 (sepuluh) debitur atau grup besar; - bagi BUS dan UUS yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) namun lebih kecil atau sama dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi pembiayaan kepada 15 (lima belas) debitur atau grup besar; - bagi BUS dan UUS yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi pembiayaan kepada 25 (dua puluh lima) debitur atau grup besar. 2) Total Pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.
15	Rasio <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> terhadap Total Aset	$\frac{\text{Tagihan Spot dan Forward}}{\text{Total Aset}}$	1) Tagihan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> meliputi seluruh tagihan <i>spot</i> dan <i>forward</i> yang tercatat di Laporan Posisi Keuangan (neraca). 2) Total Aset meliputi total aset yang tercatat pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
16	Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset	$\frac{\text{Aset Likuid Primer + Aset Likuid Sekunder}}{\text{Total Aset}}$	1) Aset Likuid Primer meliputi kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga kategori tersedia untuk dijual/ <i>Available for Sale</i> (AFS) atau <i>trading</i> , dan seluruh surat berharga pemerintah (sukuk) kategori <i>trading</i> dan AFS yang memiliki kualitas lancar, diperdagangkan pada pasar aktif, dan memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau kurang. 2) Aset Likuid Sekunder meliputi : - surat berharga pemerintah (sukuk) kategori <i>trading</i> dan AFS dengan kualitas lancar, diperdagangkan pada pasar aktif, dan memiliki sisa jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; - surat berharga pemerintah (sukuk) kategori <i>Hold to Maturity</i> (HTM) dan memiliki sisa jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan - surat berharga pemerintah (sukuk) kategori <i>trading</i> dan AFS dan memiliki sisa jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun, dengan nilai <i>haircut</i> 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pasar. 3) Total aset meliputi total aset yang tercatat pada Laporan Posisi Keuangan (neraca).
17	Rasio Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek	$\frac{\text{Aset Likuid Primer + Aset Likuid Sekunder}}{\text{Pendanaan Jangka Pendek (Short Term Funding)}}$	1) Aset Likuid Primer meliputi kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga kategori tersedia untuk dijual/ <i>Available for Sale</i> (AFS) atau <i>trading</i> , dan seluruh surat berharga pemerintah (sukuk) kategori <i>trading</i> dan AFS yang memiliki kualitas lancar, diperdagangkan pada pasar aktif, dan memiliki sisa jangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun. 2) Aset Likuid Sekunder meliputi : - surat berharga pemerintah (sukuk) kategori <i>trading</i> dan AFS dengan kualitas lancar, diperdagangkan pada pasar aktif, dan memiliki sisa jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; - surat berharga pemerintah (sukuk) kategori HTM dan memiliki sisa jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan - surat berharga pemerintah (sukuk) kategori <i>trading</i> dan AFS dan memiliki sisa jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun, dengan nilai <i>haircut</i> 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pasar. 3) Pendanaan Jangka Pendek meliputi giro, tabungan, dan deposito dengan sisa jangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun.

No.	RASIO	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
18	Rasio Deposasi Inti terhadap Total Dana Pihak Ketiga (DPK)	$\frac{\text{Deposasi Inti}}{\text{DPK}}$	1) Deposasi Inti mencakup 10 (sepuluh), 25 (dua puluh lima), atau 50 (lima puluh) deposasi terbesar dari total simpanan, berupa giro, tabungan, dan deposito, dengan kriteria sebagai berikut : - bagi BUS dan UUS yang memiliki total aset kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), meliputi 10 (sepuluh) deposasi; - bagi BUS dan UUS yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) namun lebih kecil atau sama dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 25 (dua puluh lima) deposasi; - bagi BUS dan UUS yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 50 (lima puluh) deposasi. 2) Dana Pihak Ketiga (DPK) meliputi giro, tabungan, dan deposito.
19	<i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR)	$\frac{\text{Pembiayaan}}{\text{DPK}}$	1) Pembiayaan adalah pembiayaan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kualitas Aset BUS dan UUS. 2) Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank. 3) DPK mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antarbank).
20	<i>Short Term Mismatch</i> (STM)	$\frac{\text{Aset Jangka Pendek}}{\text{Liabilitas Jangka Pendek}}$	1) Aset Jangka Pendek adalah aset likuid kurang dari 3 (tiga) bulan selain kas, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam laporan <i>maturity profile</i> sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai Laporan Bank Umum Terintegrasi. 2) Liabilitas Jangka Pendek adalah kewajiban likuid kurang dari 3 (tiga) bulan dalam laporan <i>maturity profile</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai Laporan Bank Umum Terintegrasi.
21	<i>Short Term Mismatch Plus</i> (STMP)	$\frac{\text{Aset Jangka Pendek} + \text{Kas} + \text{Secondary Reserves}}{\text{Liabilitas Jangka Pendek}}$	1) Aset Jangka Pendek adalah aset likuid kurang dari 3 (tiga) bulan selain kas, SWBI, dan SBSN dalam laporan <i>maturity profile</i> sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai Laporan Bank Umum Terintegrasi. 2) Liabilitas Jangka Pendek adalah kewajiban likuid kurang dari 3 (tiga) bulan dalam laporan <i>maturity profile</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai Laporan Bank Umum Terintegrasi.
22	Rasio Beban <i>Overhead</i> terhadap Total Aset	$\frac{\text{Beban Overhead}}{\text{Total Aset}}$	1) Beban <i>Overhead</i> meliputi Penyusutan/amortisasi, Biaya tenaga kerja, Pendidikan & pelatihan, Premi asuransi, Kerugian terkait risiko operasional, Penelitian dan pengembangan, Sewa, Promosi, Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan), Pemeliharaan dan perbaikan, Barang dan jasa, dan Lainnya. 2) Total Aset meliputi total aset yang tercatat pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
23	Rasio Beban <i>Overhead</i> terhadap Pendapatan Operasional	$\frac{\text{Beban Overhead}}{\text{Pendapatan Operasional}}$	1) Beban <i>Overhead</i> meliputi Penyusutan/amortisasi, Biaya tenaga kerja, Pendidikan & pelatihan, Premi asuransi, Kerugian terkait risiko operasional, Penelitian dan pengembangan, Sewa, Promosi, Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan), Pemeliharaan dan perbaikan, Barang dan jasa, dan Lainnya. 2) Pendapatan Operasional meliputi pendapatan margin, <i>ujrah</i> , dan bagi hasil serta pendapatan operasional lainnya.

6. Rencana Pendanaan

Bagian ini mencerminkan posisi penghimpunan dana posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penghimpunan dana untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan.

Proyeksi tahun pertama disusun secara triwulanan sedangkan proyeksi tahun kedua dan ketiga disusun secara tahunan (posisi akhir tahun).

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana serta strategi BUS dan UUS untuk merealisasikan rencana pendanaan.

Rencana pendanaan yang disusun meliputi:

- a. Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga;
- b. Rencana Penerbitan Surat Berharga; dan
- c. Rencana Pendanaan Lainnya.

Rencana pendanaan disusun dengan mengacu pada format berikut.

No	POS - POS	Aktual Sept T-1	Proyeksi						Des T+1	Des T+2
			Des T-1	T						
				Mar	Jun	Sept	Des			
	2. Valuta Asing									
	1 bulan									
	3 bulan									
	6 bulan									
	≥ 12 bulan									
	Total Deposito ⁵⁾									
	Total Dana Investasi Nonprofit Sharing									
	TOTAL PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA									
A	Rupiah									
B	Valuta Asing									
	TOTAL DEPOSAN INTI⁶⁾									
	% DEPOSAN INTI TERHADAP DANA PIHAK KETIGA									

Keterangan:

- 1) Total pada baris ini harus sesuai dengan total Dana Simpanan Wadiah – Giro pada Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
- 2) Total pada baris ini harus sesuai dengan total Dana Simpanan Wadiah – Tabungan pada Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
- 3) Total pada baris ini harus sesuai dengan total Dana Investasi *Nonprofit Sharing* - Giro pada Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
- 4) Total pada baris ini harus sesuai dengan total Dana Investasi *Nonprofit Sharing* - Tabungan pada Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
- 5) Total pada baris ini harus sesuai dengan total Dana Investasi *Nonprofit Sharing* – Deposito.
- 6) Deposan inti mencakup 10 (sepuluh), 25 (dua puluh lima) atau 50 (lima puluh) deposan terbesar dari total simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. bagi BUS dan UUS yang memiliki total aset kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), meliputi 10 (sepuluh) deposan terbesar;
 - b. bagi BUS dan UUS yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) namun lebih kecil atau sama dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 25 (dua puluh lima) deposan terbesar; dan
 - c. bagi BUS dan UUS yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) meliputi 50 (lima puluh) deposan terbesar.

b. Format Rencana Penerbitan Surat Berharga

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis	Aktual Sept T-1	Proyeksi					
			Des T-1	T				Des T+1
				Mar	Jun	Sept	Des	
A	RUPIAH							
1	Promes/Aksep							
2	Surat Berharga Komersial							
3	Medium Term Notes (MTN) Syariah							
4	Sukuk Korporasi - Subordinasi							
5	Sukuk Korporasi - Non Subordinasi							
6	Efek Beragun Aset Syariah							
7	Surat Berharga Lainnya ¹⁾							
	Total Surat Berharga Rupiah Yang Diterbitkan - Rupiah							
B	VALUTA ASING							
1	Promes/Aksep							
2	Surat Berharga Komersial							
3	Medium Term Notes (MTN) Syariah							
4	Sukuk Korporasi - Subordinasi							
5	Sukuk Korporasi - Non Subordinasi							
6	Efek Beragun Aset Syariah							
7	Surat Berharga Lainnya ¹⁾							
18	Total Surat Berharga Rupiah Yang Diterbitkan - Valuta Asing							
19	TOTAL SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN²⁾							

Keterangan:

- ¹⁾ Surat berharga lainnya termasuk Sertifikat Investasi Mudarabah Antar Bank (SIMA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.
- ²⁾ Total pada baris ini harus sesuai dengan total Surat Berharga yang diterbitkan pada Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

c. Format Laporan Rencana Pendanaan Lainnya

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Pendanaan Lain ¹⁾	Aktual Sept T-1	Proyeksi					
			Des T-1	T				Des T+1
				Mar	Jun	Sept	Des	
	PINJAMAN YANG DITERIMA							
1	Pinjaman Bank							
2	Pinjaman Luar Negeri							
3	Lainnya ²⁾							
	Total Pinjaman yang Diterima							

Keterangan:

- ¹⁾ jenis pendanaan lainnya merupakan pendanaan selain dalam bentuk penghimpunan dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito) dan penerbitan surat berharga.
- ²⁾ jenis pendanaan lainnya dapat dilampirkan pada bagian terpisah.

7. Rencana Penanaman Dana

Bagian ini mencerminkan posisi penanaman dana posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penyaluran dana untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan.

Proyeksi tahun pertama disusun secara triwulanan sedangkan proyeksi tahun kedua dan ketiga disusun secara tahunan (posisi akhir tahun).

Rencana penanaman dana antara lain memberikan informasi rencana penyediaan dana kepada pihak terkait, dan rincian rencana pemberian pembiayaan, termasuk rencana pemberian pembiayaan kepada kegiatan usaha tertentu. Jenis kegiatan usaha tertentu yang dicantumkan dalam rincian pemberian pembiayaan mencerminkan fokus pemberian pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan jenis kegiatan usaha yang diprioritaskan, dan/atau signifikansi pangsa pembiayaan maupun jumlah debitor.

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi BUS dan UUS untuk merealisasikan rencana penanaman dana.

Rencana penanaman dana yang dilaporkan meliputi:

- a. Rencana Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait;
- b. Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Inti;
- c. Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu;
- d. Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi;
- e. Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan;
- f. Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Provinsi;
- g. Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad;
- h. Rencana Pemberian Pembiayaan kepada UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi;
- i. Rencana Pemberian Pembiayaan kepada UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan;
- j. Rencana Pemberian Pembiayaan kepada UMKM Berdasarkan Provinsi;

- k. Rencana Penanaman Dana Dalam Bentuk Surat Berharga;
dan
- l. Rencana Penanaman Dana Lainnya.

Rencana penanaman dana ini disajikan dengan mengacu pada format berikut.

a. Format Rencana Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

(dalam jutaan rupiah)

No	Nama Pihak Terkait ¹⁾	Jenis Penyediaan Dana ²⁾	Customers Information File (CIF)	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
					Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
						Mar	Jun	Sept	Des		
1											
2											
3											
4											
	Total										
	% Penyediaan Dana Pihak Terkait terhadap Modal										

Keterangan:

- 1) Diisi dengan nama-nama pihak terkait.
Pihak terkait adalah pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.
- 2) Jenis Penyediaan dana dikelompokkan antara lain menjadi Pembiayaan, Penyertaan, dan Lainnya.

c. Format Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu

(dalam jutaan rupiah)

No	Kegiatan Usaha	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
1	Properti								
2	Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)								
3	Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahannya								
4	Pembiayaan Kendaraan Bermotor								
5	Kartu Pembiayaan								
6	Perusahaan Sekuritas								
7	Perusahaan Pembiayaan								
8	Lainnya (dirinci sesuai dengan kegiatan usaha utama Bank, seperti: Perkapalan, Telekomunikasi, Pembangunan Jalan Tol, Pensiunan, Pegawai ¹⁾								
	Jumlah ²⁾								

Keterangan:

- 1) Diisi dengan total rencana pemberian kredit lainnya selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sampai dengan nomor 7. Dalam hal BUS dan UUS memiliki kegiatan usaha lainnya yang relevan sebagai fokus pemberian pembiayaan, maka dapat dirinci pada bagian terpisah.
- 2) Jumlah pada baris ini harus sama dengan jumlah total Piutang, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, dan *Salam* dalam Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

d. Format Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam jutaan rupiah)

No	Sektor Ekonomi ¹⁾	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
RUPIAH									
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan								
2	Pertambangan dan Penggalian								
3	Industri Pengolahan								
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin								
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi								
6	Konstruksi								
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor								
8	Pengangkutan dan Pergudangan								
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum								
10	Informasi dan Komunikasi								
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi								
12	Real Estate								
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis								
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya								
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib								
16	Pendidikan								
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial								
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi								
19	Aktivitas Jasa Lainnya								
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri								
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya								
22	Rumah Tangga								
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya								
JUMLAH RUPIAH									

No	Sektor Ekonomi ¹⁾	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
VALUTA ASING									
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan								
2	Pertambangan dan Penggalian								
3	Industri Pengolahan								
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin								
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi								
6	Konstruksi								
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor								
8	Pengangkutan dan Pergudangan								
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum								
10	Informasi dan Komunikasi								
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi								
12	Real Estate								
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis								
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya								
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib								
16	Pendidikan								
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial								
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi								
19	Aktivitas Jasa Lainnya								
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri								
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya								
22	Rumah Tangga								
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya								
JUMLAH VALAS									
JUMLAH RUPIAH + VALAS ²⁾									

Keterangan:

- 1) Rincian sektor ekonomi mengacu pada daftar kode sektor ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.
- 2) Jumlah pada baris ini harus sama dengan jumlah total Piutang, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, dan *Salam* dalam Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

e. Format Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Penggunaan	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
RUPIAH									
A	MODAL KERJA								
	1. Ritel								
	2. Korporasi								
	3. Lainnya								
	Total Pembiayaan Modal Kerja								
B	INVESTASI								
	1. Ritel								
	2. Korporasi								
	3. Lainnya								
	Total Pembiayaan Investasi								
C	KONSUMSI								
	1. Ritel								
	2. Korporasi								
	3. Lainnya								
	Total Pembiayaan Konsumsi								
JUMLAH RUPIAH									
VALUTA ASING									
A	MODAL KERJA								
	1. Ritel								
	2. Korporasi								
	3. Lainnya								
	Total Pembiayaan Modal Kerja								
B	INVESTASI								
	1. Ritel								
	2. Korporasi								
	3. Lainnya								
	Total Pembiayaan Investasi								
C	KONSUMSI								
	1. Ritel								
	2. Korporasi								
	3. Lainnya								
	Total Pembiayaan Konsumsi								
JUMLAH VALUTA ASING									
JUMLAH PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS PENGUNAAN ¹⁾									

Keterangan:

¹⁾ Jumlah pada baris ini harus sama dengan jumlah total Piutang, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, dan *Salam* dalam Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

f. Format Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Provinsi

(dalam jutaan rupiah)

No	Nama Provinsi	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
1	Aceh								
2	Bali								
3	Banten								
4	Bengkulu								
5	DI Yogyakarta								
6	... dst								
Jumlah ¹⁾									

Keterangan:

- ¹⁾ Jumlah pada baris ini harus sama dengan jumlah total Piutang, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, dan *Salam* dalam Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

g. Format Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Akad	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
RUPIAH									
A	Piutang								
1	Murabahah								
2	Istishna'								
3	Qardh								
4	Piutang Sewa								
5	Multijasa								
B	Pembiayaan								
1	Mudarabah								
2	Musarakah								
3	Lainnya								
C	Ijarah								
D	Salam								
JUMLAH RUPIAH									
VALUTA ASING									
A	Piutang								
1	Murabahah								
2	Istishna'								
3	Qardh								
4	Piutang Sewa								
5	Multijasa								
B	Pembiayaan								
1	Mudarabah								
2	Musarakah								
3	Lainnya								
C	Ijarah								
D	Salam								
JUMLAH VALUTA ASING									
JUMLAH PEMBIAYAAN									
BERDASARKAN JENIS AKAD ¹⁾									

Keterangan:

- ¹⁾ Jumlah pada baris ini harus sama dengan jumlah total Piutang, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, dan *Salam* dalam Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

h. Format Rencana Pemberian Pembiayaan kepada UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam jutaan rupiah)

No	Sektor Ekonomi ¹⁾	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
A. USAHA MIKRO									
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan								
2	Pertambangan dan Penggalian								
3	Industri Pengolahan								
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin								
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi								
6	Konstruksi								
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor								
8	Pengangkutan dan Pergudangan								
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum								
10	Informasi dan Komunikasi								
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi								
12	Real Estate								
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis								
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya								
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib								
16	Pendidikan								
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial								
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi								
19	Aktivitas Jasa Lainnya								
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri								
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya								
22	Rumah Tangga								
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya								
JUMLAH PEMBIAYAAN USAHA MIKRO									

No	Sektor Ekonomi ¹⁾	Aktual Sept T-1	Proyeksi					Des T+1	Des T+2	
			Des T-1	T						
				Mar	Jun	Sept	Des			
B. USAHA KECIL										
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan									
2	Pertambangan dan Penggalian									
3	Industri Pengolahan									
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin									
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi									
6	Konstruksi									
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor									
8	Pengangkutan dan Pergudangan									
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum									
10	Informasi dan Komunikasi									
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi									
12	Real Estate									
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis									
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya									
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib									
16	Pendidikan									
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial									
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi									
19	Aktivitas Jasa Lainnya									
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri									
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya									
22	Rumah Tangga									
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya									
JUMLAH PEMBIAYAAN USAHA KECIL										

No	Sektor Ekonomi ¹⁾	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
C. USAHA MENENGAH									
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan								
2	Pertambangan dan Penggalian								
3	Industri Pengolahan								
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin								
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi								
6	Konstruksi								
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor								
8	Pengangkutan dan Pergudangan								
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum								
10	Informasi dan Komunikasi								
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi								
12	Real Estate								
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis								
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya								
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib								
16	Pendidikan								
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial								
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi								
19	Aktivitas Jasa Lainnya								
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri								
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya								
22	Rumah Tangga								
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya								
JUMLAH PEMBIAYAAN USAHA MENENGAH									
JUMLAH PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI (A + B + C)									

Keterangan:

- 1) Rincian sektor ekonomi mengacu pada sektor ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

k. Format Rencana Penanaman Dana Dalam Bentuk Surat Berharga

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Pengguna	Aktual Sept T-1	Des T-1	Proyeksi				Des T+1	Des T+2
				T					
			Mar	Jun	Sept	Des			
A. RUPIAH									
1	Surat Berharga Pasar Keuangan Syariah								
	a. Surat Perbendaharaan Negara Syariah								
	b. Promes								
	c. Wesel								
	1) Wesel Ekspor								
	2) Wesel Surat Pembiayaan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)								
	3) Wesel Lainnya								
	d. <i>Medium Term Notes</i> (MTN) Syariah								
	e. Lainnya								
2	Surat Berharga Pasar Modal Syariah								
	a. Sertifikat Reksadana Syariah								
	b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)								
	1) Sukuk Negara								
	2) Sukuk Ritel								
	c. Sukuk Subordinasi								
	d. Sukuk Lainnya								
	e. Efek Beragun Aset								
	f. Lainnya ²⁾								
	JUMLAH RUPIAH								
B. VALUTA ASING									
1	Surat Berharga Pasar Keuangan Syariah								
	a. Surat Perbendaharaan Negara Syariah								
	b. Promes								
	c. Wesel								
	1) Wesel Ekspor								
	2) Wesel Surat Pembiayaan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)								
	3) Wesel Lainnya								
	d. <i>Medium Term Notes</i> (MTN) Syariah								
	e. Lainnya								
2	Surat Berharga Pasar Modal Syariah								
	a. Sertifikat Reksadana Syariah								
	b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)								
	1) Sukuk Negara								
	2) Sukuk Ritel								
	c. Sukuk Subordinasi								
	d. Sukuk Lainnya								
	e. Efek Beragun Aset								
	f. Lainnya ²⁾								
	JUMLAH VALUTA ASING								
JUMLAH PENANAMAN DANA DALAM BENTUK SURAT BERHARGA (JUMLAH RUPIAH + VALUTA ASING) ¹⁾									

Keterangan:

- 1) Jumlah pada baris ini harus sama dengan total Surat Berharga yang Dimiliki pada Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
- 2) Surat berharga lainnya termasuk SIMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

1. Format Rencana Penanaman Dana Lainnya

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Penanaman Dana	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
1	...								
2	...								
3	...								
4	...								
5	...								
Jumlah									

Keterangan:
Diisi dengan rencana penanaman dana selain yang sudah dicantumkan pada tabel a sampai dengan tabel k.

8. Rencana Penyertaan Modal bagi BUS

Bagian ini mencerminkan posisi penyertaan modal posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penyertaan modal untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan yang paling sedikit meliputi bidang usaha, perkiraan jumlah dana yang akan ditanamkan, dan persentase kepemilikan termasuk aspek pengendalian, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.

Rencana penyertaan modal disusun dengan mengacu pada format berikut.

Format Rencana Penyertaan Modal bagi BUS

(dalam jutaan rupiah)

Nama Perusahaan	Tujuan Penyertaan ¹⁾	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Jumlah ²⁾									

Keterangan:

- ¹⁾ Diisi berdasarkan tujuan penyertaan modal antara lain untuk investasi - penyertaan pada perusahaan anak, untuk investasi - penyertaan pada perusahaan asosiasi, dan untuk restrukturisasi pembiayaan.
- ²⁾ Jumlah pada baris ini harus sama dengan total penyertaan pada Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

9. Rencana Permodalan

Bagian ini paling sedikit meliputi:

a. Proyeksi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bagi BUS

Proyeksi KPMM paling sedikit meliputi proyeksi modal, proyeksi Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan proyeksi rasio KPMM untuk 3 (tiga) tahun mendatang.

Proyeksi tahun pertama disusun secara triwulanan sedangkan proyeksi tahun kedua dan tahun ketiga disusun secara tahunan (posisi akhir tahun).

Tata cara mengenai perhitungan KPMM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum syariah.

b. Rencana Perubahan Modal

Rencana perubahan modal merupakan proyeksi perubahan modal untuk 3 (tiga) tahun mendatang baik terkait struktur permodalan maupun jumlah modal.

Termasuk dalam rencana perubahan modal adalah rencana penambahan modal dari pemegang saham lama (*existing shareholders*), rencana penawaran umum (*initial public offering*), hak memesan efek terlebih dahulu (*right issue*), penerbitan surat utang yang bersifat ekuitas, dan rencana penambahan modal lainnya, serta uraian mengenai rencana perubahan atau penggantian kepemilikan (jika ada).

Rencana perubahan modal untuk UUS adalah perubahan dana bersih yang ditempatkan bank umum yang memiliki UUS pada UUS setelah dikurangi dengan penempatan UUS pada bank umum yang memiliki UUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai unit usaha syariah.

Rencana permodalan disusun dengan mengacu pada format berikut.

No	Nama Komponen	Aktual Sept T-1	Proyeksi					
			Des T-1	T				Des T+1
				Mar	Jun	Sept	Des	
	1.4.4 Penyerahan -/-							
	1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak yang berupa perusahaan asuransi (khusus untuk konsolidasi) -/-							
	1.4.6 Eksposur sekuritisasi -/-							
	1.4.7 Investasi pada instrumen <i>Additional Tier 1</i> (AT1) dan/atau <i>Tier 2</i> pada bank lain -/-							
	Total Modal Inti Utama (CET 1)							
	2. Modal Inti Tambahan (AT 1)							
	2.1 Instrumen yang Memenuhi Persyaratan (AT 1)							
	2.2 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan (AT 1) -/-							
	Total Modal Inti Tambahan (AT 1)							
	Total Modal Inti (1.1. + 1.2.)							
II	Modal Pelengkap (Tier 2)							
	1 Instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan <i>Tier 2</i>							
	2 Agio/Disagio							
	3 Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Pembiayaan)							
	4 Cadangan tujuan							
	5 Faktor Pengurang Modal Pelengkap							
	5.1 <i>Sinking Fund</i> -/-							
	5.2 Investasi pada instrumen <i>Tier 2</i> pada bank lain -/-							
	Total Modal							
	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO							
	ATMR RISIKO Pembiayaan							
	Selisih lebih cadangan umum PPA atas aset produktif yang menjadi pengurang ATMR Risiko Pembiayaan -/-							
	ATMR RISIKO PASAR							
	ATMR RISIKO OPERASIONAL							
	TOTAL ATMR							
	RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO %							
	RASIO KPMM							
	Rasio CET 1							
	Rasio <i>Tier 1</i>							
	Rasio <i>Tier 2</i>							
	Rasio KPMM							
	CET 1 UNTUK <i>BUFFER</i>							
	PRESENTASE <i>BUFFER</i> YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK							
	<i>Capital Conservation Buffer</i>							
	<i>Countercyclical Buffer</i>							
	<i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik							

Keterangan:

- 1) Berlaku bagi BUS yang diwajibkan untuk membentuk *Capital Conservation Buffer* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
- 2) Berlaku bagi BUS yang diwajibkan untuk membentuk *Countercyclical Buffer* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
- 3) Berlaku bagi BUS yang diwajibkan untuk membentuk *Capital Surcharge* untuk bank sistemik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan bank sistemik dan *capital surcharge*.

2) Format Rencana Perubahan Modal

(dalam jutaan rupiah)

No	Nama Komponen	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sept	Des		
A	POSISI MODAL								
	Pemegang Saham ¹⁾								
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	Total Modal Disetor								
B	Initial Public Offering (IPO) - Go Public								
C	Right Issue								
C	Lainnya								
	JUMLAH POSISI MODAL (A+B+C+D)								

Keterangan:

¹⁾ Diisi dengan keterangan nama masing-masing pemegang saham.

10. Rencana Pengembangan Organisasi dan SDM

Bagian ini menguraikan informasi mengenai struktur organisasi dan kondisi SDM terkini, rencana pengembangan organisasi dan SDM yang sedang berlangsung, maupun rencana pengembangan terkait SDM lainnya paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ke depan yang antara lain memuat:

a. Rencana Pengembangan Organisasi

Rencana pengembangan organisasi antara lain mencakup rencana pembentukan atau perubahan satuan kerja dan/atau komite, yang disesuaikan dengan kemampuan, ukuran, dan kompleksitas usaha BUS dan UUS.

b. Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Rencana pengembangan sistem informasi manajemen antara lain mencakup pengembangan teknologi informasi yang mendukung sistem informasi untuk manajemen dan rencana pengembangan sistem akuntansi, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk rencana pengembangan tersebut.

c. Rencana Pengembangan SDM

Rencana pengembangan SDM antara lain rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM, termasuk rencana biaya atau anggaran pendidikan dan pelatihan baik untuk pegawai, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS, serta rencana pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat tertentu.

d. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing

Rencana pemanfaatan tenaga kerja asing dilakukan antara lain sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan.

e. Rencana Penggunaan Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*)

Rencana penggunaan tenaga alih daya antara lain mencakup rencana jumlah yang akan digunakan dan rencana penempatan tenaga alih daya.

Penggunaan tenaga alih daya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.

Rencana Pengembangan Organisasi dan SDM disusun dengan mengacu pada format berikut.

a. Format Kondisi dan Rencana Kebutuhan SDM

Posisi Jabatan ¹⁾	Aktual Sept ²⁾ T-1	Proyeksi ²⁾				
		Des T-1	T			
			Mar	Jun	Sept	Des

Keterangan:

1) Posisi Jabatan diisi sesuai dengan struktur organisasi BUS atau UUS mulai pejabat satu tingkat di bawah direksi sampai dengan pegawai terendah, termasuk staf ahli seperti tenaga kontrak profesional, staf khusus direksi (di luar *outsourcing*).

2) Diisi dengan angka jumlah SDM.

b. Format Rencana Pendidikan dan Pelatihan SDM

JENIS PENDIDIKAN/PELATIHAN	JENIS JABATAN	JUMLAH	WAKTU	LEMBAGA PENYELENGGARA	RENCANA BIAYA

c. Format Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan
Format Rencana Penggunaan Tenaga Alih Daya
(*Outsourcing*)

Format Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing

No.	Bidang Tugas dan Posisi		Jumlah	Nama TKA	Jangka Waktu	Nama Tenaga Pendamping	Rencana Program Alih Pengetahuan
	Posisi Jabatan	Lingkup					
1	Komisaris						
2	Direksi						
3	Pimpinan Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri						
4	Pemimpin Kantor Perwakilan						
5	Pejabat Eksekutif						
6	Tenaga Ahli/ Konsultan						
7	Jabatan lainnya ¹⁾						
	Alasan pemanfaatan TKA serta alasan tidak/belum menggunakan Tenaga Kerja Indonesia:						
	a.....						
	b.....						
	dst.....						

Keterangan:

1) jika ada, sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Format Rencana Penggunaan Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) ¹⁾

NO.	BIDANG KERJA PENUGASAN ²⁾	Aktual Sept T-1	Proyeksi				
			Des T-1	T			
				Maret	Juni	Sept	Des
1							
2							
3							
4							
dst							

- Keterangan:
- 1) Bidang Kerja Penugasan diisi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain
 - 2) Diisi dengan angka jumlah Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*)

11. Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru
- Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru merupakan uraian mengenai rencana penyelenggaraan produk BUS dan UUS yang memenuhi definisi produk bank baru sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum. Bagian ini memuat fokus pengembangan dan hasil analisis dalam penyelenggaraan produk bank baru untuk 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru paling sedikit mencakup:

a. Fokus Pengembangan

Fokus pengembangan mencakup rencana yang bersifat menyeluruh mengenai fokus arah pengembangan yang sejalan dengan strategi BUS dan UUS paling sedikit meliputi aspek-aspek yang melatarbelakangi dan/atau yang menjadi pertimbangan dan tujuan untuk merencanakan penyelenggaraan produk baru.

b. Hasil Analisis Secara Keseluruhan

Hasil analisis secara keseluruhan paling sedikit mencakup:

- 1) analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman;
- 2) analisis manfaat dan biaya; dan
- 3) hal-hal yang masih perlu disesuaikan oleh BUS dan UUS, termasuk dari sisi manajemen risiko, sehubungan dengan rencana penerbitan produk baru. Rincian analisis untuk masing-masing produk dapat disampaikan pada saat pengajuan produk baru. Dalam hal BUS dan UUS telah melakukan analisis lainnya, hasil analisis dimaksud juga dapat dicantumkan.

Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru disusun dengan mengacu pada format berikut.

12. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor meliputi rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan jaringan kantor untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Pengertian jaringan kantor serta cakupan jaringan kantor yang dilaporkan dalam rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Informasi yang dimuat dalam rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor antara lain meliputi informasi mengenai kantor induk, rencana waktu pelaksanaan, perkiraan investasi, lokasi, dan keterangan lainnya.

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor disusun dengan mengacu pada format berikut.

Format Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

No	Nama Kantor	Informasi Kantor			Kantor Induk ⁴⁾	Rencana Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Investasi / Biaya	Lokasi			Keterangan ⁵⁾
		Jenis Kantor ¹⁾	Sandi Kantor ²⁾	Status ³⁾				Alamat	Kota	Provinsi	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											

Keterangan:

- 1) Diisi dengan sandi jenis jaringan kantor yang dilaporkan dalam rencana bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- 2) Diisi dengan sandi kantor BUS dan UUS. Tata cara pengisian sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Diisi dengan informasi pembukaan, perubahan status, perpindahan alamat, dan/atau penutupan jaringan kantor.
- 4) Kantor induk merupakan kantor/unit organisasi sebagai penyelia dari jaringan kantor tersebut. Tata cara pengisian sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Keterangan lebih rinci dapat dilampirkan dalam bagian terpisah.

13. Informasi Lainnya

Informasi lainnya memuat rencana-rencana lain yang perlu diuraikan (jika ada) namun tidak termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan pada angka 1 sampai dengan angka 12, antara lain:

- a. langkah-langkah penyelesaian pembiayaan yang bermasalah termasuk AYDA. Pengertian AYDA sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- b. aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional BUS dan UUS;
- c. *linkage program*;
- d. pengembangan pelayanan BUS dan UUS yang mencakup antara lain:
 - 1) informasi rencana pengembangan sarana atau media informasi kepada nasabah;
 - 2) rencana pengembangan sarana elektronik untuk kebutuhan nasabah; dan
 - 3) rencana upaya perlindungan nasabah, antara lain rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan; dan/atau
- e. informasi lain yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

II. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS

Laporan Realisasi Rencana Bisnis paling sedikit mencakup:

1. Informasi Realisasi Rencana Bisnis dan Tindak Lanjut mencakup antara lain:
 - a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus, dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan antara rencana dengan realisasinya;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi; dan
 - c. tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
2. Rasio Keuangan dan Pos-Pos Tertentu; dan
3. Informasi Lainnya yang berisi penjelasan mengenai realisasi hal-hal selain yang dijelaskan pada angka 1 dan angka 2, antara lain:
 - a. Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah dan unit usaha syariah;
 - b. Laporan Realisasi Tenaga Kerja Asing sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan;
 - c. Laporan Realisasi Pendidikan dan Pelatihan SDM; dan
 - d. Laporan Realisasi *Linkage Program*.

Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara umum disusun dengan mengacu pada format berikut:

1. Format Informasi Realisasi Rencana Bisnis dan Tindak Lanjut

1.	Penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus, dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan antara rencana dengan realisasinya ¹⁾
	
	
	
	
2.	Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi
	
	
	
	
	
3.	Tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis
	
	
	

Keterangan:

¹⁾ Perbandingan Rencana Bisnis dengan realisasi selain mencakup Laporan Realisasi Rasio Keuangan dan Pos-pos Tertentu, BUS dan UUS perlu juga menjelaskan besaran realisasi yang terkait dengan proyeksi keuangan, penghimpunan dana, penyaluran dana, dan rencana permodalan yang belum tercakup dalam lampiran tersebut.

2. Format Laporan Realisasi Rasio Keuangan dan Pos-pos Tertentu

No	Rasio - Rasio	Target	Realisasi	Deviasi	Keterangan
A	RASIO KEUANGAN POKOK (%) ^{1) 2)}				
1	Rasio KPMM ⁵⁾				
2	Rasio Modal Inti terhadap ATMR ⁵⁾				
3	Rasio Modal Inti Utama terhadap ATMR ⁵⁾				
4	Rasio Modal Inti terhadap Modal Pelengkap ⁵⁾				
5	Rasio Modal Inti terhadap Total Aset ⁵⁾				
6	ROE ⁵⁾				
7	ROA				
8	NOM				
9	NI				
10	BOPO				
11	Rasio <i>Fee Based Income</i> terhadap Total Pendapatan Operasional				
12	Rasio Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan				
13	Rasio Aset Produktif Bermasalah dan Aset NonProduktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset NonProduktif				
14	Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif				
15	Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif				
16	Rasio CKPN yang Telah Dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) Wajib Dibentuk				

No	Rasio - Rasio	Target	Realisasi	Deviasi	Keterangan
17	Rasio NPF				
	- <i>Gross</i>				
	- <i>Net</i>				
18	Rasio Pembiayaan terhadap Total Aset Produktif				
19	Rasio Debitur Inti terhadap Total Pembiayaan				
20	Rasio Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) terhadap Total Pembiayaan				
21	Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah yang Belum Ditarik				
	<i>committed</i>				
	- Rupiah				
	- Valuta asing				
	<i>uncommitted</i>				
	- Rupiah				
	- Valuta asing				
22	Rasio <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> terhadap Total Aset				
23	Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset				
24	Rasio Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek				
25	Rasio Deposasi Inti terhadap Total Dana Pihak Ketiga				
26	CIR				
27	FDR				
28	STM				
29	STMP				
30	RDI				

No	Rasio - Rasio	Target	Realisasi	Deviasi	Keterangan
B	RASIO-RASIO TERTENTU LAINNYA (%)				
1	Rasio Total Pembiayaan kepada Usaha Mikro terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM				
2	Rasio Total Pembiayaan kepada Usaha Kecil terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM				
3	Rasio Total Pembiayaan kepada Usaha Menengah terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM				
4	Rasio Total Pembiayaan kepada UMKM terhadap Total Pembiayaan				
5	Rasio Dana Pendidikan dan Pelatihan terhadap Pengeluaran Realisasi/Anggaran Sumber Daya Manusia (SDM) ³⁾				
	Rasio Sisa Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Tahun Ini yang digunakan untuk Tahun Berikutnya ⁴⁾				
6	Rasio Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Bank terhadap Modal				

Keterangan:

- 1) Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- 2) Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman pada penjelasan rasio keuangan pokok.
- 3) Cakupan dana pendidikan dan latihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan dana untuk pengembangan sumber daya manusia bank umum.
- 4) Yang dimaksud dengan sisa anggaran adalah selisih antara dana yang wajib disediakan dengan realisasinya.
- 5) Hanya berlaku bagi BUS.

3. Format Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

No	Nama Kantor	Informasi Kantor			Kantor Induk ⁴⁾	Tanggal Realisasi	Lokasi			Keterangan ⁵⁾
		Jenis Kantor ¹⁾	Sandi Kantor ²⁾	Status ³⁾			Alamat	Kota	Provinsi	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

Keterangan:

- ¹⁾ Diisi dengan sandi jenis jaringan kantor yang dilaporkan dalam rencana bisnis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- ²⁾ Diisi dengan sandi kantor BUS dan UUS. Tata cara pengisian sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- ³⁾ Diisi dengan informasi pembukaan, perubahan status, perpindahan alamat dan/atau penutupan jaringan kantor
- ⁴⁾ Kantor induk merupakan kantor/unit organisasi sebagai penyelia dari jaringan kantor tersebut. Tata cara pengisian sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
- ⁵⁾ Keterangan lebih rinci dapat dilampirkan dalam bagian terpisah.

4. Format Laporan Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing, Hasil Pelaksanaan Kewajiban Alih Pengetahuan, dan Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*)

Format Laporan Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan kepada Tenaga Pendamping

No.	Nama TKA	Bidang Tugas	Posisi/ Jabatan		Nama Pendamping	Hasil Evaluasi Terhadap Pendamping	Pendidikan/ Pelatihan kepada Pendamping	Lembaga Pelaksana	Keterangan
			TKA	Pendamping					
1					1 2				
2					1 2				
dst.					dst.				

Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Alih Pengetahuan oleh Tenaga Kerja Asing

No.	Nama TKA	Waktu Pelatihan/ Pengajaran	Lokasi Pelatihan/ Pengajaran	Jumlah Peserta	Jangka Waktu	Materi/ Topik
1		1 2				
2		1 2				
dst.		dst.				

Format Laporan Realisasi Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*)

No.	Posisi Jabatan	Bidang Kerja Penugasan	Jumlah	Jangka Waktu
1				
2				
dst.				

Keterangan:

- Bidang Tugas dan Bidang Kerja diisi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan.
- Disertai lampiran foto-foto kegiatan pelatihan.

5. Format Laporan Realisasi Pendidikan dan Pelatihan SDM

NO.	JENIS PENDIDIKAN/PELATIHAN	JENIS JABATAN	JUMLAH	WAKTU REALISASI	LEMBAGA PENYELENGGARA	REALISASI BIAYA	KETERANGAN
1							
2							
3							
4							
dst							

6. Format Laporan Realisasi *Linkage Program*

NO.	PIHAK PERANTARA	KUALITAS	JUMLAH	
			REKENING	NOMINAL
A.	CHANNELLING			
	1	1. Lancar		
		2. Dalam Perhatian Khusus		
		3. Kurang Lancar		
		4. Diragukan		
		5. Macet		
	2	1. Lancar		
		2. Dalam Perhatian Khusus		
		3. Kurang Lancar		
		4. Diragukan		
		5. Macet		
	dst	1. Lancar		
		2. Dalam Perhatian Khusus		
		3. Kurang Lancar		
		4. Diragukan		
		5. Macet		
	JUMLAH	1. Lancar		
		2. Dalam Perhatian Khusus		
		3. Kurang Lancar		
		4. Diragukan		
		5. Macet		
B.	EXECUTING			
	1			
	2			
	dst			
	JUMLAH	1. Lancar		
		2. Dalam Perhatian Khusus		
		3. Kurang Lancar		
		4. Diragukan		
		5. Macet		
	JUMLAH REALISASI <i>LINKAGE PROGRAM</i> (A + B)			

III. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

Sesuai POJK RBB, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis. Cakupan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang disusun oleh Dewan Komisaris paling sedikit meliputi penilaian mengenai:

1. pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah;
2. faktor-faktor yang memengaruhi kinerja BUS dan UUS secara umum, khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), serta profil risiko BUS dan UUS terutama risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, dan tata kelola yang baik; dan
3. upaya memperbaiki kinerja BUS dan UUS, dalam hal dari hasil penilaian sebagaimana pada angka 2 terjadi penurunan kinerja.

Penilaian Dewan Komisaris pada angka 1 sampai dengan angka 3, dapat dilengkapi pula dengan penilaian atas faktor-faktor eksternal yang memengaruhi operasional BUS dan UUS.

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disusun dengan mengacu pada format berikut.

Format Laporan Pengawasan Rencana Bisnis

a. Penilaian Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis
b. Penilaian Dewan Komisaris tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja BUS dan UUS secara umum, khususnya terkait faktor permodalan (<i>capital</i>), rentabilitas (<i>earnings</i>), profil risiko terutama risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan tata kelola yang baik
c. Penilaian Dewan Komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja BUS dan UUS, dalam hal menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Bank sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas terdapat penurunan

Keterangan:

Penilaian Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf c dapat dilengkapi dengan penilaian Dewan Komisaris mengenai faktor-faktor eksternal yang memengaruhi operasional BUS dan UUS.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja